BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam pelaksanaan penghimpunan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkannya undang-udang Nomor 32 Tahun 1956 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dan Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Umum Retribusi Daerah, selanjutnya membentuk urusan pajak pada Bagian Penghasilan Daerah Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Nopember 1960 : P/361/A/Drh, embrio ini kemudian berkembang dan ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur yang berkedudukan di jalan Karet No. 90 Surabaya.

Pada tahun 1962 ini merupakan langka awal kegiatan Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : Des/451/G/28/Drh tanggal 28 maret 1962, namn berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : Des/1205/G/110/Drh tanggal 26 September 1962 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur baru dinyatakan berlaku pada tanggal 1 oktober 1962, tanggal pemberlakuan ini yang diperingati sebagai hari jadi bagi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur.

Sejak tanggal 11 juni 1977 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berkedudukan di Jalan Mayar kertoarjo nomor 1 Surabaya yang saat ini menjadi

Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dengan 38 (tiga puluh delapan) Unit Pelaksana Teknis Dinas diseluruh Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000 yang menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur.

Proses perubahan lembaga Dinas Pendapatan menyangkut perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan dan peranan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan lebih mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi suatu potensi yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanana pembangunan Jawa Timur.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan fungsi (*by function*), sebab kegiatan pada kantor Dinas dititik-beratkan pada penyusunan kebijakan bidang Pendapatan Daerah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 dan gambar 2.2 di bawah ini :

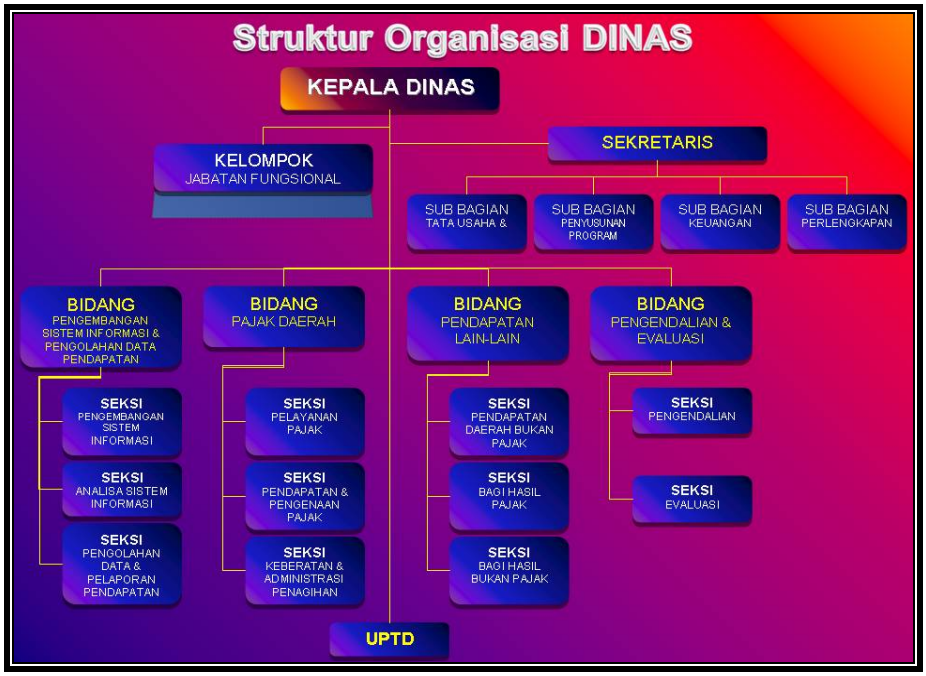

Gambar 2.1 Struktur Oraganisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD.

2.3 Visi Dan Misi

2.3.1 Visi

Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dibanggakan dalam pelayanan publik.

2.3.2 Misi

a. Bidang Pendapatan Daerah

   Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung-jawab dan berkelanjutan.

b. Bidang Pelayanan Publik

   Mewujudkan pelayanan publik yang baik (*excellent service*), terparcaya dan transparan.

c. Bidang Kelembagaan

   Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang potensial, integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompentensi.